



RENCANA KERJA PERUBAHAN
BAPPEDALITBANG KAB. BANYUMAS
TAHUN 2022

BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang.....	1
	1.2 Landasan Hukum.....	2
	1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
	1.4 Sistematika.....	4
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 Sampai Dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Perangkat Daerah	5
	2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD.....	11
	2.3 Review Terhadap Renja Bappedalitbang Tahun 2022.....	13
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	32
BAB V	PENUTUP	49



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan dilakukan sebagai wujud dan bentuk kepastian bahwa sumber daya yang dipergunakan optimal dalam mewujudkan cita-cita pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagai siklus dinamis dipengaruhi kondisi lingkungan strategis regional dan nasional bahkan internasional. Perubahan lingkungan strategis harus dapat diadaptasi dengan perubahan perencanaan untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas pembangunan sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai dengan penyesuaian terhadap berbagai perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 maka Renja dapat dilakukan perubahan dikarenakan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan pada Tahun 2022 ; dan/atau
 - b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

2. Penambahan kegiatan baru akibat kebijakan nasional dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Renstra ditetapkan, dan keadaan darurat atau keadaan luar biasa yang memaksa Pemerintah untuk melakukan perubahan perencanaan.

Sesuai amanat tersebut, Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Renja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati Banyumas No 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022. Renja Perubahan merupakan dokumen rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD Perubahan yang disertai dengan upaya mendukung percepatan pencapaian target maupun mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Selanjutnya Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah tahun 2012-2014;

10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2012 tentang Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan terakhir melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Banyumas No 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 adalah menyesuaikan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun 2021 yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tujuan :

1. Sebagai pedoman Bappedalitbang Kabupaten Banyumas dalam mengimplementasikan RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Mensinergikan rencana program dan kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam APBD Induk Tahun 2022;
3. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran termasuk prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022;

1.4. SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang perubahan Renja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022, dasar hukum perubahan Renja, maksud, tujuan, serta sistematika perubahan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II dan analisis capaian kinerja perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan review terhadap Renja Induk Tahun 2022.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan dan sasaran, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas ini menyajikan dasar pengukuran kinerja yang telah diraih atau dilaksanakan selama tahun 2022 sampai dengan triwulan II.

Analisis capaian kinerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas sampai dengan triwulan II tahun berkenaan dengan IKU, kinerja program dan keuangan menunjukkan hasil sebagai berikut:

Capaian Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang:

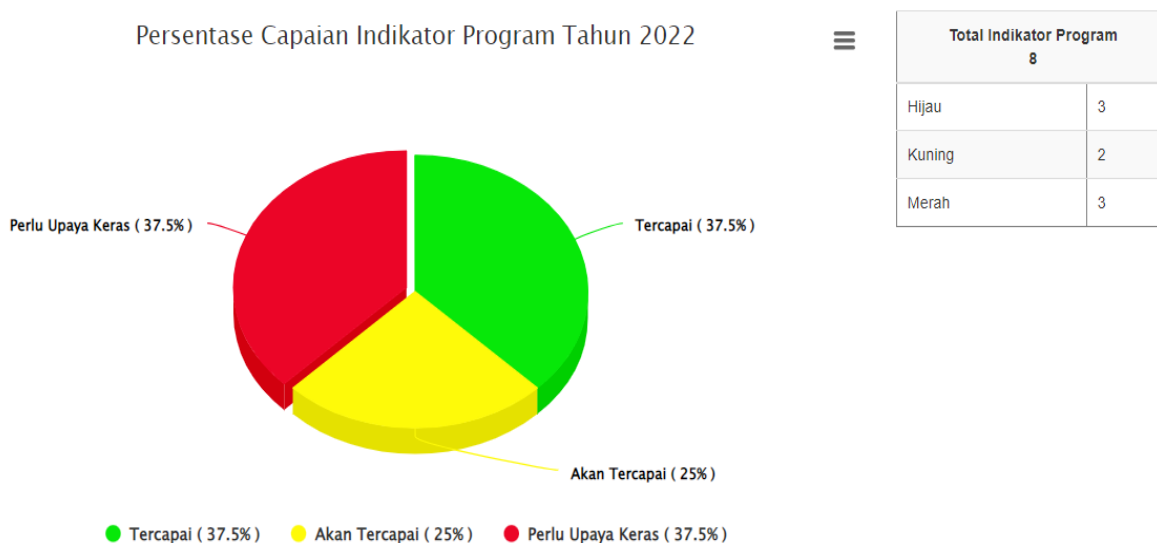
1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja nilai Penilaian Pembangunan Daerah (PPD). Realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini masih N/A karena data belum publish dari Provinsi Jawa Tengah.
2. Meningkatnya kualitas penelitian dan pengembangan daerah yang diukur dengan indikator persentase hasil-hasil penelitian yang direkomendasikan sebagai bahan kebijakan. Realisasi kinerja yang ditunjukkan oleh indikator ini sebesar 16,84%.
3. Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan indikator Manajemen Risiko Indeks (MRI). Realisasi kinerja pada indikator ini masih menunjukkan hasil N/A karena hasil penilaian dari BPKP belum publish.

CAPAIAN KINERJA PROGRAM s/d TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Aspek/Program/Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD	Realisasi Sampai Tahun 2021	Tahun 2022		Tingkat Capaian RKPd 2022 s/d TW II	Status Capaian 2022	Tingkat Capaian RKPd 2022 Terhadap RPJMD	Status Capaian 2022 Triwulan II
					Target 2022	Realisasi 2022 s/d Triwulan II				
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH										
1.1	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program	%	90	91.37	80	63.37	79.21	▶	70.41	▶
1.2	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPd	%	100	98.44	100	100	100	●	100	●
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										
2.1	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	●	100	●
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										
3.1	Persentase implementasi kelitbang	%	100	100	100	95.45	95.45	▶	95.45	▶
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										
4.1	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	92.31	100	25	25	▼	25	▼
4.2	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	●	100	●
4.3	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	57.14	57.14	▼	57.14	▼
4.4	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	97.59	100	49.27	49.27	▼	49.27	▼

Sumber : Form 4 e money Bappedalitbang Tahun 2022

Persentase Capaian Indikator Program Tahun 2022



Berdasarkan diagram tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 37,5% indikator kinerja program telah tercapai, 25 % akan tercapai dan 37,5% lainnya perlu upaya keras. Sedangkan dalam melaksanakan program tersebut Bappedalitbang disupport anggaran sebesar Rp 11.608.453.059 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappedalitbang Tahun 2022. Dari anggaran tersebut sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp 4.030.957.857 atau sebesar 34,63%.

CAPAIAN KINERJA KEUANGAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2022

Uraian	Pagu (Rp)	Rencana Keuangan (Rp)	Rencana Keuangan (%)	Realiasi Keuangan (Rp)	Realiasi Keuangan (%)
Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Daerah	11,608,453,059	6,882,309,624	59.67	4,030,957,857	34.63
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	8,439,319,600	4,753,106,348	56.39	3,380,080,069	40.01
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	355,000,000	297,136,900	83.73	5,255,483	1.47
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30,000,000	16,600,000	55.34	1,243,000	4.14
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	325,000,000	280,536,900	86.31	4,012,483	1.24
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,760,841,698	2,931,727,840	50.76	2,831,739,139	49.19
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn	5,555,161,698	2,806,077,840	50.48	2,768,809,139	49.89
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	205,680,000	125,650,000	61.11	62,930,000	30.59
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31,191,000	18,000,000	57.71	0	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31,191,000	18,000,000	57.71	0	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	707,344,948	447,360,180	63.15	245,624,053	34.74
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	11,910,000	6,000,000	50.38	0	0
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	99,508,621	36,000,000	36.16	6,720,000	6.75

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31,236,180	31,236,180	100	970	3.11
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	224,174,550	110,890,000	49.45	29,955,799	13.36
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	28,468,597	14,000,000	49.19	2,347,750	8.25
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	312,047,000	249,234,000	79.86	205,630,504	65.89
<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>295,467,500</i>	<i>283,455,500</i>	<i>95.94</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Pengadaan Mebel	54,678,500	54,678,500	100	0	0
Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	195,768,000	183,756,000	93.87	0	0
Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	45,021,000	45,021,000	100	0	0
<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>843,293,954</i>	<i>448,508,428</i>	<i>53.22</i>	<i>269,615,272</i>	<i>31.99</i>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	119,084,514	82,729,708	69.55	41,412,760	34.76
Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	99,443,000	50,443,000	50.73	7,350,000	7.39
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624,766,440	315,335,720	50.38	220,852,512	35.31
<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>446,180,500</i>	<i>326,917,500</i>	<i>73.25</i>	<i>27,846,122</i>	<i>6.23</i>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	191,950,000	106,000,000	55.24	24,726,122	12.88
Pemeliharaan Mebel	7,500,000	7,500,000	100	0	0
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	69,313,000	36,000,000	51.94	3,120,000	4.51
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	138,000,000	138,000,000	100	0	0
Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	39,417,500	39,417,500	100	0	0
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	825,000,000	730,524,929	88.39	229,155,100	27.77
<i>Penyusunan Perencanaan Dan Pendanaan</i>	<i>650,000,000</i>	<i>588,100,554</i>	<i>90.53</i>	<i>209,104,100</i>	<i>32.18</i>
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	300,000,000	280,818,054	93.59	154,656,000	51.55
Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	350,000,000	307,282,500	87.83	54,448,100	15.56
<i>Analisis Data Dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>50,000,000</i>	<i>40,854,375</i>	<i>81.71</i>	<i>7,352,000</i>	<i>14.7</i>
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	50,000,000	40,854,375	81.71	7,352,000	14.7
<i>Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</i>	<i>125,000,000</i>	<i>101,570,000</i>	<i>81.26</i>	<i>12,699,000</i>	<i>10.16</i>

Koordinasi Pengendalian Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten/kota	50,000,000	42,534,000	85.07	8,700,000	17.4
Monitoring, Evaluasi Dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	75,000,000	59,036,000	78.74	3,999,000	5.33
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,104,133,459	717,921,879	65.03	278,555,288	25.25
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia</i>	<i>226,000,000</i>	<i>106,037,500</i>	<i>46.9</i>	<i>70,655,350</i>	<i>31.23</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	35,000,000	8,934,500	25.52	2,640,000	7.54
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	30,000,000	8,138,000	27.13	6,268,250	20.89
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	31,000,000	18,700,000	60.29	17,728,500	57.19
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	50,000,000	21,300,000	42.6	9,393,300	18.79
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	30,000,000	15,460,000	51.54	9,165,700	30.55
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	50,000,000	33,505,000	67.01	25,459,600	50.91
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian Dan Sda (sumber Daya Alam)</i>	<i>268,216,900</i>	<i>268,216,900</i>	<i>100</i>	<i>51,579,040</i>	<i>19.23</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	71,117,000	71,117,000	100	15,845,000	22.29
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	45,898,000	45,898,000	100	5,207,000	11.34
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	43,055,000	43,055,000	100	15,819,370	36.74

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	52,840,100	52,840,100	100	4,031,770	7.63
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sda	32,111,800	32,111,800	100	1,824,000	5.68
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sda	23,195,000	23,195,000	100	8,851,900	38.16
<i>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur Dan Wilayah</i>	<i>609,916,559</i>	<i>343,667,479</i>	<i>56.33</i>	<i>156,320,898</i>	<i>25.61</i>
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	78,803,500	77,303,500	98.1	15,659,300	19.87
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	45,000,000	41,290,000	91.74	15,681,300	34.85
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	403,873,059	148,536,979	36.74	100,027,099	24.73
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (rpjpd, Rpjmd Dan Rkpd)	39,841,500	35,138,500	88.19	10,576,099	26.54
Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	10,158,500	9,158,500	90.15	280	2.76
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas Dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	32,240,000	32,240,000	100	14,097,100	43.73
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	1,240,000,000	680,756,468	54.84	143,167,400	11.55
<i>Penelitian Dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pengkajian Peraturan</i>	<i>475,000,000</i>	<i>222,930,000</i>	<i>46.91</i>	<i>142,747,400</i>	<i>30.08</i>
Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	425,000,000	186,050,000	43.81	142,747,400	33.6
Fasilitasi, Pelaksanaan Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan Bidang Aparatur Dan Reformasi Birokrasi	50,000,000	36,880,000	73.75	0	0
<i>Penelitian Dan Pengembangan Bidang Sosial Dan Kependudukan</i>	<i>250,000,000</i>	<i>159,073,435</i>	<i>63.62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Penelitian Dan Pengembangan Pariwisata	200,000,000	109,073,435	54.55	0	0

Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan	50,000,000	50,000,000	100	0	0
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	425,000,000	274,398,333	64.58	0	0
Penelitian Dan Pengembangan Perindustrian Dan Perdagangan	100,000,000	72,133,333	72.13	0	0
Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan Dan Pangan	150,000,000	141,600,000	94.4	0	0
Penelitian Dan Pengembangan Kelautan Dan Perikanan	75,000,000	0	0	0	0
Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup	50,000,000	31,665,000	63.34	0	0
Penelitian Dan Pengembangan Perhubungan	50,000,000	29,000,000	58	0	0
Pengembangan Inovasi Dan Teknologi	90,000,000	24,354,700	27.05	420	0.46
Penelitian, Pengembangan, Dan Perencanaan Di Bidang Teknologi Dan Inovasi	80,000,000	18,754,700	23.44	420	0.52
Sosialisasi Dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang	10,000,000	5,600,000	56	0	0

Sumber: Laporan Jegos Bappedalitbang Bulan Juni 2022

2.2. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

Isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan terkait Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Banyumas tahun 2022 adalah :

1. Masih belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Masih belum optimalnya capaian kinerja pembangunan.

Hal ini merupakan permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan oleh Bappedalitbang Kabupaten Banyumas. Bappedalitbang mempunyai tugas peran strategis di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana serta anggaran yang memadai guna mendukung tercapainya tujuan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Bappedalitbang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan program kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
- b. perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. pelaksanaan koordinasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan dengan Pemerintah Pusat, Provinsi maupun lingkup Kabupaten/DPRD/lembaga/masyarakat untuk sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. pendistribusian tugas dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- e. pembinaan dan fasilitasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- g. pelaksanaan administrasi kebijakan kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappedalitbang yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan penguatan sumber daya
2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan menerapkan konsep thematic, holistic, integrative, spasial (this)
3. Penguatan kegiatan-kegiatan kelitbang agar berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving) dengan jaminan mutu hasil kelitbang
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan menerapkan pengelolaan risiko di level pemda dan perangkat daerah

2.3 REVIEW TERHADAP RENJA BAPPEDALITBANG TAHUN 2022

Dengan terbitnya Pemutakhiran Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 yang mengamatkan indikator kinerja pada level sub kegiatan, maka perlu dilakukan review terkait dengan perencanaan kinerja. Bappedalitbang telah melaksanakan review terhadap cascading dengan menggunakan indikator sub kegiatan sesuai amanat Kepmendagri 050/5889 Tahun 2021 yang ditunjukkan dalam matrik sebagai berikut:

MATRIK HASIL REVIEW RENJA 2022

Renstra Perubahan Tahun 2018-2023		Hasil Review Berdasarkan Kependagri 050/5889 Tahun 2021	
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
	Jumlah monev Renja OPD bidang infrastruktur yang dilaksanakan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monev Renja OPD bidang kewilayahan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah monev Renja OPD bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monev Renja OPD bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monev Renja OPD bidang perekonomian yang dilaksanakan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monev Renja OPD bidang SDA yang dilaksanakan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi kelitbang	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase implementasi kelitbang

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah hasil kajian bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah hasil kajian bidang perindustrian dan perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil kajian bidang pertanian, perkebunan dan pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah hasil kajian bidang kelautan dan perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil kajian bidang lingkungan hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah hasil kajian bidang perhubungan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah hasil kajian bidang perumahan dan kawasan permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah hasil kajian bidang aspek-aspek sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah hasil kajian bidang pendidikan dan kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah hasil kajian bidang pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil kajian bidang kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah hasil kajian bidang tenaga kerja	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah publikasi inovasi daerah	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data profil daerah	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data profil daerah
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data profil daerah yang terisi	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah tahapan penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen ranwal RPJMD, RKPD
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah berita Acara Konsultasi Publik
		Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah berita acara Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kehadiran unsur keterwakilan musrenbang kabupaten	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perkada Renja OPD yang disusun	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)
	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program		Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD

Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah rakor/sosialisasi/ pembinaan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monev perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Jumlah penggandaan yang tersedia		

X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah kegiatan SPPD yang dilaksanakan (Bangub)		

MATRIK RENCANA KERJA PERUBAHAN BAPPEDALITBANG KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2022

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja dan Pendanaan	
			Target	Rp.
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	%	100	674.027.441
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tersusun	Dokumen	2	600.000.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah kehadiran unsur keterwakilan musrenbang kabupaten	unsur	10	250.000.000
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perkada Renja OPD yang disusun	Dokumen	2	350.000.000
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian data profil daerah	%	82	74.027.441
Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data profil daerah yang terisi	data	99	74.027.441
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	%	100	1.073.260.400
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia yang disusun	Dokumen	3	211.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Kali	25	25.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah monev Renja OPD bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Kali	4	25.000.000

Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Kali	10	46.000.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Kali	30	35.000.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah monev Renja OPD bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Kali	8	30.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia	Kali	20	50.000.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam yang disusun	Dokumen	2	263.216.900
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Kali	30	66.117.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah monev Renja OPD bidang perekonomian yang dilaksanakan	Kali	4	45.898.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Kali	10	43.055.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	Kali	25	52.840.100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah monev Renja OPD bidang SDA yang dilaksanakan	Kali	4	32.111.800
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Kali	5	23.195.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun	Dokumen	3	599.043.500
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Kali	25	78.803.500

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah monev Renja OPD bidang infrastruktur yang dilaksanakan	Kali	8	45.000.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Kali	5	385.000.000
	Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP)	Kali	4	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Kali	8	43.841.500
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah monev Renja OPD bidang kewilayahan yang dilaksanakan	Kali	4	9.158.500
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan	Kali	4	37.240.000
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	350.000.000
X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang disusun	Dokumen	3	350.000.000
X.XX.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokumen	3	25.000.000
X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	4	325.000.000
	Jumlah kegiatan SPPD yang dilaksanakan (Ban-gub)	Keg	6	
	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	6.023.622.775
X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah administrasi keuangan yang dikelola	Jenis	3	6.023.622.775
X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangannya	Orang	46	5.825.170.216

X.XX.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Orang	12	198.452.559
	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	%	100	735.931.814
X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah yang tersedia	Jenis	3	279.750.814
X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	Jumlah Meubelair Kantor yang tersedia	Unit	2	54.678.500
X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin kantor yang tersedia	Unit	9	180.360.000
X.XX.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Unit	2	44.712.314
X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang / gedung milik daerah yang dilaksanakan	Jenis	5	456.181.000
X.XX.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional SKPD yang dipelihara	Unit	29	191.950.000
X.XX.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebelair yang dipelihara	Unit	4	7.500.000
X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	30	79.313.000
X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Pemkab yang dipelihara	Unit	1	138.000.000
X.XX.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Unit	4	39.418.000
	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	1.641.619.147
X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah administrasi kepegawaian yang dikelola	Jenis	12	10.760.000
X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang	25	10.760.000

X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum yang dikelola	Jenis	6	798.951.007
X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Tersedia	Jenis	2	11.910.000
X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Jenis	4	103.258.621
X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Jenis	3	35.236.180
X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Bulan	12	213.404.550
X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan yang tersedia	Buah	50	28.468.597
	Jumlah penggandaan yang tersedia	lbr	36200	
X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi/Konsultasi dan Pertemuan Tingkat Provinsi/Pusat yang dilaksanakan	Kali	60	406.673.059
X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	Jenis	3	831.908.140
X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik, dan air yang dikelola	Bulan	12	119.496.700
X.XX.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Jenis	3	64.800.000
X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pegawai Non ASN	Orang	25	647.611.440
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				
	Persentase implementasi kelitbangan	%	100	1.240.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang disusun	Dokumen	10	475.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan umum	Dokumen	8	415.000.000

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Dokumen	1	50.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah hasil kajian bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi	Dokumen	1	10.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen bidang sosial dan kependudukan yang disusun	Dokumen	5	250.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah hasil kajian bidang pariwisata	Dokumen	2	200.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah hasil kajian bidang Kesehatan	Dokumen	1	50.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Dokumen	7	425.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah hasil kajian bidang perindustrian dan perdagangan	Dokumen	1	100.000.000
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah hasil kajian bidang pertanian, perkebunan dan pangan	Dokumen	2	150.000.000
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah hasil kajian bidang kelautan dan perikanan	Dokumen	1	75000000
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah hasil kajian bidang lingkungan hidup	Dokumen	1	50.000.000
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah hasil kajian bidang perhubungan	Dokumen	1	50.000.000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen inovasi daerah yang disusun	Dokumen	1	90.000.000
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah peserta yang mengikuti lomba Krenova	Orang	40	80.000.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah publikasi inovasi daerah	Kali	3	10.000.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				
	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja Program	%	80	125.000.000

Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Program RKPD yang dijabarkan secara konsisten ke dalam APBD	%	100	125.000.000
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah rakor/sosialisasi/ pembinaan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan	Keg	4	50.000.000
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen hasil monev perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Dokumen	4	75.000.000

Sumber: RKPD Perubahan Tahun 2022



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 sampai dengan triwulan II dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan terhadap output dan pagu indikatif program.

Uraian program dan kegiatan beserta plafon anggaran pada perubahan rencana kerja Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Perubahan Program dan Kegiatan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022										Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah			Sebelum	Sesudah	Tolok Ukur	Target			
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah											
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																	
5	01														10,368,453,059	10,638,461,577			12,911,550,606			
5	01	01													8,439,319,600	8,751,173,736			10,235,849,000			
5	01	01	2.01												355,000,000	350,000,000			608,197,000			
5	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	100%	30,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	33,395,000
5	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Dokumen 6 Kegiatan	4 Dokumen 6 Kegiatan	100%	100%	325,000,000	325,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	574,802,000
5	01	01	2.02												5,760,841,698	6,023,622,775			7,037,282,000			

5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	46 Orang	46 Orang	100%	100%	5,555,161,698	5,825,170,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,853,872,000
5	01	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pengelola keuangan SKPD	Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Orang	12 Orang	100%	100%	205,680,000	198,452,559	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Kelancaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	183,410,000
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										31,191,000	10,760,000				52,431,000		
5	01	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	25 Orang	25 Orang	100%	100%	31,191,000	10,760,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	52,431,000
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										707,344,948	798,951,007				989,317,000		
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%	100%	11,910,000	11,910,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	15,734,000
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Jenis	4 Jenis	100%	100%	99,508,621	103,258,621	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	91,078,000

5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	31,236,180	35,236,180	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	33,991,000
5	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah logistik kantor yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	224,174,550	213,404,550	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	206,875,000
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah cetakan yang tersedia Jumlah penggandaan yang tersedia	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	50 Buah 36200 Lembar	50 Buah 36200 Lembar	100%	100%	28,468,597	28,468,597	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	26,274,000
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi konsultasi/konsulta dan pertemuan tingkat provinsi/pusat yang dilaksanakan	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	60 Kali	60 Kali	100%	100%	312,047,000	406,673,059	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	615,365,000
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										295,467,500	279,750,814					235,673,000	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah meubelair kantor yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	54,678,500	54,678,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	37,642,000
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah peralatan dan mesin kantor yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	9 Jenis	9 Jenis	100%	100%	195,768,000	180,360,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	159,279,000

5	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung kantor atau bangunan lainnya yang tersedia	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Unit	2 Unit	100%	100%	45,021,000	44,712,314	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	38,752,000
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										843,293,954	831,908,140					784,605,000	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah langganan surat kabar, telepon, internet, listrik dan air yang dikelola	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	119,084,514	119,496,700	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	184,562,000
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sewa peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%	100%	99,443,000	64,800,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	55,609,000
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pegawai Non ASN	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	25 Orang	25 Orang	100%	100%	624,766,440	647,611,440	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	544,434,000
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										446,180,500	456,181,000					528,344,000	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah kendaraan operasional SKPD yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	29 Unit	29 Unit	100%	100%	191,950,000	191,950,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	263,316,000

5	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah mebelair yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Unit	4 Unit	100%	100%	7,500,000	7,500,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	15,179,000
5	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah peralatan kantor dan mesin lainnya yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	30 Unit	30 Unit	100%	100%	69,313,000	79,313,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	72,002,000
5	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah gedung Pemkab yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Unit	1 Unit	100%	100%	138,000,000	138,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	152,639,000
5	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/ Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Persentase barang milik daerah yang memadai	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Unit	4 Unit	100%	100%	39,417,500	39,418,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang memadai	100%	25,208,000
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH											825,000,000	799,027,441				1,206,510,606	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan											650,000,000	600,000,000				930,952,593	
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Jumlah kehadiran unsur keterwakilan musrenbang kabupaten	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	10 Unsur	10 Unsur	100%	100%	300,000,000	250,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	100%	507,280,308

5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Jumlah dokumen Perkada Renja OPD yang disusun	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	350,000,000	350,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	100%	423,672,285
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										50,000,000	74,027,441					50,598,000	
5	01	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	Jumlah data profil daerah yang terisi	Persentase program RPJMD yang dijabarkan ke RKPD	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	99 Data	99 Data	100%	100%	50,000,000	74,027,441	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD	100%	50,598,000
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah										125,000,000	125,000,000					224,960,013	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	Jumlah rakor/sosialisasi pembinaan evaluasi rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja program	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	80%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	80%	80%	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	80%	125,980,005
5	01	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	Jumlah monev perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan	Rata-rata persentase capaian indikator kinerja program	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80%	80%	4 Kegiatan	4 Kegiatan	80%	80%	75,000,000	75,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Rata-rata Persentase capaian Indikator Kinerja Program	80%	98,980,008
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH										1,104,133,459	1,088,260,400					1,469,191,000	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia										226,000,000	226,000,000					418,951,000	

5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pemerintahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	25 Kali	25 Kali	100%	100%	35,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	57,500,000
5	01	03	2.01	01	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah monev Renja OPD bidang pemerintahan yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Kali	4 Kali	100%	100%	30,000,000	25,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	65,539,000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	10 Kali	10 Kali	100%	100%	31,000,000	46,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	60,718,000
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 Kali	30 Kali	100%	100%	50,000,000	35,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	73,398,000

5	01	03	2.01	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	0 SKPD	0 SKPD	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	0
5	01	03	2.01	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Monev Renja OPD bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	8 Kali	8 Kali	100%	100%	30,000,000	30,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	75,898,000
5	01	03	2.01	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 Kali	20 Kali	100%	100%	50,000,000	65,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	85,898,000
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)										268,216,900	263,216,900				296,269,000	
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	30 Kali	30 Kali	100%	100%	71,117,000	66,117,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	78,338,000

5	01	03	2.02	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	0 SKPD	0 SKPD	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	0
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah monev Renja OPD bidang perekonomian yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Kali	4 Kali	100%	100%	45,898,000	45,898,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	50,598,000
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	10 Kali	10 Kali	100%	100%	43,055,000	43,055,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	47,239,000
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	20 Kali	20 Kali	100%	100%	52,840,100	52,840,100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	58,398,000

5	01	03	2.02	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	0 SKPD	0 SKPD	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	0
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah monev renja OPD bidang SDA yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Kali	4 Kali	100%	100%	32,111,800	32,111,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	35,359,000
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra perangkat daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	5 Kali	5 Kali	100%	100%	23,195,000	23,195,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	26,337,000
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan										609,916,559	599,043,500				753,971,000	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	25 Kali	25 Kali	100%	100%	78,803,500	78,803,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	103,518,000

5	01	03	2.03	02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah bidang infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	0 SKPD	0 SKPD	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	0
5	01	03	2.03	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP(IPDMIP) Jumlah Monev Renja OPD bidang infrastruktur yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	0 Kali 8Kali	0 Kali 8Kali	100%	100%	45,000,000	45,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	91,137,000
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah dukungan kegiatan IPDMIP (IPDMIP) Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Kali 5 Kali	4 Kali 5 Kali	100%	100%	403,873,059	385,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	362,659,880
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi penyusunan dokumen perencanaan bidang kewilayahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	8 Kali	8 Kali	100%	100%	39841500	43,841,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	78,218,000

5	01	03	2.03	06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah SKPD yang difasilitasi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	0 SKPD	0 SKPD	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	0
5	01	03	2.03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah Monev Renja OPD bidang kewilayahan yang dilaksanakan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	4 Kali	4 Kali	100%	100%	10,158,500	9,158,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	56,359,000
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	Jumlah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah		100%	100%	4 Kali	4 Kali	100%	100%	32,240,000	37,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase program RPJMD yang dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah	100%	62,079,120
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										1,240,000,000	1,240,000,000			1,425,476,992		
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH										1,240,000,000	1,240,000,000			1,425,476,992		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan										475,000,000	475,000,000			697,696,000		

5	05	02	2.01	02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian bidang pemerintahan umum	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Banyumas, Baturraden, Semua Kelurahan	100%	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	100%	425,000,000	415,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase implementasi kelitbangan	100%	622,696,000
5	05	02	2.01	04	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian bidang aparatur dan reformasi birokrasi	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase implementasi kelitbangan	100%	75,000,000
5	05	02	2.01	05	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian bidang keuangan dan aset daerah reformasi birokrasi	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	0	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase implementasi kelitbangan	100%	0
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan										250,000,000	250,000,000				304,248,992	
5	05	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian bidang aspek-aspek sosial	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase implementasi kelitbangan	100%	154,248,992
5	05	02	2.02	03	Penelitian dan Pengembangan	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah hasil kajian bidang	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua	100%	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	100%	0	0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase implementasi kelitbangan	100%	0

								Semua Kelurahan														
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Persentase implementasi kelitbangan	Jumlah publikasi inovasi daerah	Persentase implementasi kelitbangan	Kab. Banyumas, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	100%	3 Kali	3 Kali	100%	100%	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Persentase implementasi kelitbangan	100%	30,359,000
TOTAL																11,608,453,059	11,878,461,577					14,337,027,598

Sumber : SIPD RENJA Perubahan Tahun 2022



BAB V

PENUTUP

BAB IV

P E N U T U P


Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2022 akan berdampak terhadap kesesuaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2022 termasuk terhadap keuangan daerah. Perubahan RKPD kemudian ditindaklanjuti dengan penyesuaian terhadap Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sebagai dokumen rencana kerja yang digunakan dalam proses penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, terutama pada fokus prioritas daerah, fokus program dan kegiatan, serta target kinerja penyelenggaraan perangkat daerah. Renja akan menjadi pedoman pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan pada Bappedalitbang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan Renja Perubahan Bappedalitbang Kabupaten Banyumas Tahun 2022, beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Perubahan Bappedalitbang Tahun 2022 berpedoman pada dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2022 dalam upaya sinkronisasi program dan kegiatan, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas, APBD Propinsi Jawa Tengah, maupun APBN.
2. Bappedalitbang dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban berperan serta dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
3. Perubahan Rencana Kerja Bappedalitbang Tahun 2022 menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022.
4. Sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Semoga melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2022 mampu mendorong terwujudnya cita-cita pembangunan Kabupaten Banyumas menuju **“Banyumas yang Maju, Adil-Makmur dan Mandiri”**.

KEPALA BAPPEDALITBANG
KABUPATEN BANYUMAS



Ir. KRISTANTA, M.Si
NIP. 19650515 199303 1 012